ANALISA PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID – 19

Laporan Magang MB-KM

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1 Akuntansi

Program Studi Akuntansi

Disusun Oleh :

M Iqbal Abiyyu

NIM :31401800106

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISA PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID – 19

Disusun Oleh: MUHAMMAD IQBAL ABIYYU

NIM : 31401800106

Susunan Dewan Penguji

Dosen pembimbing lapangan

Dr. Kiryanto,SE.,M.Si, Ak., CA

NIK. 211492004

Dosen Penguji 1

Dr. Dra.Hj. Winarsih, SE, M.Si., CSRS

NIK. 211415029

Dosen Penguji 2

Dosen Penguji 2
Digitally signed by Lisa Kartikasari
Date: 2023.02.27 15:03:41 +07'00'

Dr. Lisa Kartikasari, SE, M.si,AK., CA

NIK. 211402010

Kaprodi S1 Akuntansi

Provita Wijayanti, SE., M.Si, Ak, CA

NIDN: 0611088001

HALAMAN PERNYATAAN

Nama	: Muhammad Iqbal Abiyyu
NIM	: 31401800106
Program Studi	: S1 Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Universitas	: Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan bahwa tugas akhir Laporan Magang MB-KM ini yang berjudul **"ANALISA PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID – 19"** merupakan karya penilitian sendiri dan tidak ada usur *plagiarism* dengan cara tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di pergunakan sebagai semestinya

Semarang, 8 Februari 2023

Yang membuat pernyataan

M. Iqbal Abiyyu

NIM. 31401800106

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan hidayah-Nya serta inayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan dan panutan kita, Rasulullah Nabi Muhammad S.A.W.

Dalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan ini, penulis telah banyak mendapat bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya.
2. Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Keluarga tercinta untuk setiap tetes kasih sayang, bimbingan, doa dan restu yang tidak pernah putus.
4. Ibu Prof. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Kiryanto,SE.,M.Si, Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Magang yang telah membimbing serta memberikan ilmu kepada penulis.
6. Bapak Drs Joko Santosa,M.Si selaku kepala bidang parkir.
7. Rusmanto SE selaku Dosen Supervisor yang telah membimbing dan memberikan saran selama pelaksanaan kerja praktek di Dinas Perhubungan Kota Semarang.

8. Serta seluruh teman-teman saya yang telah membantu menyelesaikan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam pembuatan Laporan Akhir Magang ini tidak lepas dari bantuan semua pihak. Akan keterbatasan dan kelemahan ilmu pengetahuan dan pengalaman, sehingga dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka penulis mengharapkan saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan laporan ini. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi penulis sendiri.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 8 Februari 2023

Yang menyatakan,

M Iqbal Abiyyu

NIM 31401800106

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **3**
DAFTAR ISI **6**
PENDAHULUAN **10**
1.1 Latar Belakang 10
1.2 Tujuan magang **14**
1.2.1 Tujuan Umum Magang 14
1.2.2 Tujuan Khusus Magang 14
1.3 Sistematika Laporan **15**
BAB II **17**
PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG **17**
2.1 Profil Perusahaan **17**
2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan 17
2.1.2 Bagan Organisasi Dishub Kota Semarang 20
2.1.3 Tugas-Tugas Setiap Bidang Parkir 21
2.2 Aktivitas Magang **22**
BAB III **25**
IDENTIFIKASI MASALAH **25**
3.1 Rumusan masalah **25**
BAB IV **27**
KAJIAN PUSTAKA **27**
4.1 Undang-Undang Tentang Parkir **27**
4.2 Retribusi Parkir **29**
4.2.1 Objek, Subjek dan Retribusi Parkir 29
4.3 Sistem Pengendalian Internal **30**
4.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal 30

4.3.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal.....32

4.3.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal.....35

4.4 Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 35

4.4.1 Pengertian Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 35

4.4.2 Sumber Penerimaan Kas 36

4.5 Deskripsi Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Piutang.....36

4.5.1 Fungsi yang terkait.....36

4.5.2 Dokumen Yang Digunakan.....37

4.6 Catatan Akuntansi Yang Digunakan.....36

4.7 Kerangka Pemikiran.....38

4.8 Pengembangan Hipotesis.....39

BAB V.....41

ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....41

5.1 Analisis 41

5.1.1 Desain Penelitian.....41

5.1.2 Populasi dan Sampel 42

5.1.3 Sumber Data.....42

5.1.4 Teknik Analisis Data.....42

5.2 Metode Penelitian.....44

5.2.1 Analisis Perbandingan.....44

5.2.1.1 Statistik Deskriptif 44

5.2.1.2 Analisis Deskriptif Rank Test 46

5.2.1.3 Wilcoxon Signed Test 47

5.3 Pembahasan dan Implikasi. 48

5.3.1 Bagaimana Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Retribusi Parkir? .48

5.3.2 Bagaimana Penerimaan Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kota Semarang Sebelum Dan Selama Pandemi?.....62

6.1 Kesimpulan 64

6.2 Rekomendasi.....64

6.2.1 Rekomendasi Teehadap Hasil Penelitian.....65

6.2.2 Rekomendasi Yang Perlu Diperbaiki Organisasi Tempat Magang Terhadap Peserta Magang 65

6.2.3 Rekomendasi Yang Perlu Diperbaiki Program Studi.....65

BAB VII.....67

REFLEKSI DIRI.....67

Daftar Pustaka.....58

Lampiran.....59

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Birokrasi ialah suatu organisasi tidak terlepas dari fungsinya dalam pelayanan publik sejak lama. Birokrasi ada karena mereka sepenuhnya melayani tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan karakteristik positif tersebut, birokrasi merupakan sarana yang sangat cocok bagi organisasi untuk meminimalkan pengaruh politik dan individu terhadap keputusan organisasi.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak dan retribusi, daerah mempunyai wewenang guna memungut berbagai pajak dan retribusi berhubungan aspek kehidupan masyarakat, yang dipakai guna meningkatkan pendapatan pendapatan daerah guna meningkatkan kebutuhan daerah. Dengan mendukung terwujudnya otonomi melalui sumber pendanaan berdasarkan desentralisasi, desentralisasi dan dukungan, maka perlu adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk sistem keuangan diatur sesuai pembagian wewenang dan tugas yang jelas dan tanggung jawab antar berbagai tingkat pemerintahan guna membawa daerah ke tingkat otonomi lebih tinggi dan menuju kemandirian daerah, kemampuan keuangan daerah adalah ciri utama daerah berpemerintahan sendiri dan berpemerintahan sendiri.

Salah satu bentuk pungutan daerah adalah parkir berdasarkan Peraturan Jalan Nasional Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Kota Semarang Tahun 2004 mengenai Penyelenggaraan dan retribusi parkir pada kedua sisi jalan

umum. Parkir berguna untuk menghindari parkir tanpa izin di tepi jalan yang dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Parkir ialah bagian dari subsistem transportasi jalan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di bidang parkir, pengelolaan lingkungan hidup, ketertiban dan arus lalu lintas serta sebagai sumber pendapatan daerah (TAMPON).

Parkir juga secara umum dipahami sebagai upaya untuk mempercepat lalu lintas, meningkatkan produktivitas dengan menggunakan sumber daya manusia dan alam milik negara, dan mengubah masa lalu yang buruk menjadi era baru. Retribusi parkir Kota Semarang ialah sumber pendapatan daerah berpotensial besar pada PAD Kota Semarang, hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya kendaraan bermotor di Kota Semarang. Pendapatan parkir Kementerian Perhubungan pada tahun 2019 sebesar Rp3.941.585.000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp1.852.827.000.

Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki tugas dan fungsi mengelola lahan parkir di setiap sudut Kota Semarang, khususnya parkir umum tepi jalan. Setiap tahunnya Dinas Perhubungan Kota Semarang mempunyai target yang ingin dicapai sesuai data akhir tahun sebelumnya. Tabel data kinerja dan target parkir umum pinggir jalan di Semarang tahun 2019-2020 adalah:

Tabel 1.1 Realisasi dan Target Parkir Tepi Jalan Umum di Semarang Tahun 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase target dan Realisasi Parkir	Selisih Target Dan Realisasi Parkir
2019	Rp30,364,428,000,-	Rp3,941,585,000,-	12,98%	Rp26,422,843,000,-
2020	Rp3,221,381,800,-	Rp3,448,515,000,-	107.05%	Rp227,133,200,-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2020

Tabel 1.1 Target Rekomendasi Parkir Umum Jalan di Kota Semarang Tahun 2019-2020, nilai aktual adopsi parkir umum pinggir jalan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tahun 2019, realisasi pendapatan parkir sebesar Rp 3.448.515.000. -. Pada tahun 2020 terjadi penurunan target sehingga target tarif dan pencapaian parkir lebih tinggi dibandingkan tahun 2019, namun terdapat ketimpangan pada bagian pencapaian sehingga akan mempengaruhi pendapatan daerah kota semarang kedepannya karena rendahnya pendapatan. sudah turun drastis. Penurunan tersebut disebabkan dampak pandemi terjadi sejak awal tahun 2020 sampai saat ini. Dampak pandemi sangat berdampak pada tarif parkir karena mobilitas masyarakat menurun sehingga menyebabkan Jukir (petugas parkir) yang ditunjuk Kementerian Perhubungan membayar tarif lebih rendah dari tarif yang ditetapkan.

Dampak pandemi menyerang semua kalangan termasuk Dinas Perhubungan Kota Semarang juga mengalami dampak dari pandemi dan menyebabkan turunya

penerimaan pajak dari parkir sehingga akan mempengaruhi pendapatan daerah, kondisi ini didukung berdasarkan data pada tabel 1.1 yaitu turunnya pendapatan dari pajak parkir sangat jauh dari yang sudah ditetapkan pada tahun 2020. Berdasarkan kondisi turunnya penerimaan perkir terkadang ada juga jukir (juru pakir) yang minta permohonan pengurangan atau penurunan pajak karena pendapatan yang mereka dapat dari parkir tidak memenuhi yang sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan itu sendiri sedangkan pada masa pandemi sekarang kegiatan masyarakat sangat dibatasi oleh pemerintah mulai dari mobilisasi maupun perdagangan dan Work From Home sehingga juru parkir pun mengalami penurunan pada pendapatan yang menyebabkan turunnya pada pendapatan parkir ditahun 2020 yang signifikan.

Dalam laporan kali ini penulis akan berfokus kepada pembahasan penerimaan retribusi parkir selama pendemi yang berkaitan dengan beberapa masalah sudah disebutkan di atas kedepannya dibahas secara lebih terperinci serta solusi yang akan di berikan agar masalah tersebut terselesaikan tanpa merugikan siapapun. Tujuan pembahasan dampak pandemi terhadap retribusi parkir (Dinas Perhubungan Divisi Parkir Kota Semarang) bertujuan untuk menganalisa apakah pandemi sangat berpengaruh terhadap penerimaan parkir serta menganalisis pendapatan Dinas Perhubungan selama dan sebelum pandemi. Permasalahan timbul karna adanya kebijakan sudah ditetapkan oleh pemerintah guna mengurangi penyebaran Covid-19 dengan cara Work From Home, dan PPKM mengurangi mobilisasi penduduk sehingga para masyarakat sangat jarang sekali

keluar rumah, hal tersebut yang menyebabkan turunnya pendapatan para juru parkir dikarenakan masyarakat tidak keluar rumah dan tidak ada kendaraan yang parkir di lahan parkir. Berkurangnya pendapatan pegawai valet akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak bagi Dinas Perhubungan, karena penerimaan pajak dinas parkir sangat bergantung pada pegawai parkir valet, sehingga jika tenaga penjual mengalami penurunan penjualan maka akan sulit dihadapi oleh tenaga penjualan. pajak dan ini akan mempengaruhi tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.

1.2 Tujuan magang

1.2.1 Tujuan Umum Magang

Tujuan bersama adalah keseluruhan tujuan pembelajaran yang dicapai dalam proses pembelajaran itu sendiri. Tujuan umum kursus ini adalah:

1.2.2 Tujuan Khusus Magang

Tujuan spesifik adalah tujuan lebih spesifik. Umumnya meamakai kata-kata aktif agar lebih jelas dicapai. Tujuan khusus kursus yaitu:

1. Menganalisa kinerja Dinas Perhubungan Kota Semarang ketika pandemi terjadi
2. Menganalisa dampak penerimaan Dinas Perhubungan Kota Semarang sebelum dan selama pandemi.

1.3 Sistematika Laporan

Sistematika laporan sebagai berikut:

1. Halaman judul
2. Lembar pengesahan
3. Kata pengantar
4. Daftar isi
5. BAB 1: PENDAHULUAN

   Menjelaskan konteks dan tujuan berdasarkan pengalaman magang, seperti pokok persoalan atau risiko apa saja yang muncul selama magang .
6. BAB II: PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

   Menerangkan profil institusi tertentu yang bersangkutan dan jelaskan kegiatan atau kegiatan apa saja selama magang .
7. BAB III: IDENTIFIKASI MASALAH

   Menjelaskan permasalahan yang dihadapi Jukir dan Kementerian Perhubungan akibat dampak pandemi dan cara Kementerian Perhubungan berupaya memperbaiki permasalahan tersebut .
8. BAB IV: KAJIAN PUSTAKA

   Penjelasan teori digunakan dalam pembahasan penelitian laporan magang .
9. BAB V: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

   Bab ini menjelaskan pembahasan dan analisis tentang permasalahan yang diangkat.

10. Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi

    Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi yang membangun untuk objek penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu bagi pihak Sekretaris Daerah Kabupaten Demak terhadap realisasi pencairan anggaran dana.

11. Bab VII Refleksi Diri

    Penjabaran tentang hal-hal positif yang diterima mahasiswa selama kegiatan magang berlangsung. Selain itu menjelaskan tentang manfaat magang terhadap pengembangan kemampuan *soft-skills* dan penerapan masa perkuliahan di tempat kerja.

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Profil Perusahaan

Dinas Perhubungan Kota Semarang atau biasa disebut Dishub merupakan birokrasi pelayanan transportasi yang handal dan tertib di kota perdagangan dan jasa. Kantor Dishub berada di Jl. Tambak Aji Raya No.5 Ngaliyan Kota Semarang, Kontak: 1500094 Media Sosial: @dishubkotasmg / dishub.semarangkota.go.id

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

Visi :

"TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI YANG HANDAL DAN TERTIB DI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA"

Visi tersebut di atas mengandung arti sebagai berikut :

1. Transportasi, dalam arti suatu sistem yang terdiri atas peralatan dan prasarana didukung oleh manajemen dan sumber daya manusia (SDM), pembentukan jaringan infrastruktur jaringan dan layanan.
2. Layanan transportasi yang andal, ditandai dengan tersedianya transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu, mudah dirawat, memadai, hingga ke seluruh penjuru kota dan mampu mendukung bantuan pembangunan perkotaan.
3. Kota Komersial, yang mengandung makna kota berdasarkan bentuk pembangunan ekonomi dengan fokus pada perdagangan sesuai karakteristik

masyarakat perkotaan dan di dalamnya melekat kinerja fungsi pelayanan yang menjadi tulang punggung pembangunan.

4. Kota Jasa, sebutan kota jasa praktis tidak dapat dipisahkan dari status kota niaga karena kegiatan pertukaran akan selalu dikaitkan dengan masalah komersial atau dengan proses transaksi penerjemahan dan pendistribusian barang dan jasa.

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Perhubungan di atas, maka dijabarkan dalam misi:

1. Mewujudkan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan.
2. Mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pengelolaan terminal.
3. Mewujudkan pelayanan transportasi masal perkotaan dan perparkiran yang nyaman dan tertib.
4. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana transportasi.
5. Mewujudkan peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor.

Tercapainya peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Area parkir terdiri atas bagian pendataan, bagian pengumpulan, bagian tata letak dan perizinan. Misi Bidang Parkir adalah merencanakan, mengkoordinasikan, memajukan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan, Bidang Parkir Umum dan Khusus serta Pengawasan dan Pengendaliannya. Guna menjalankan tugas ini, Departemen Parkir bertanggung jawab :

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan
3. Pemberian petunjuk kepada bawahan
4. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
5. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait
6. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan dibidang parkir
7. Pelaksanaan kegiatan seksi pendataan, seksi pemungutan, seksi penataan, dan perizinan
8. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi dibidang parkir
9. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dibidang parkir
10. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
12. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Perencanaan parkir Kota Semarang didasarkan pada Peraturan Jalan Raya Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004

mengenai Penyelenggaraan dan Ketentuan Parkir Pada Jalan. Selain itu, Kota Semarang telah menerapkan larangan parkir di jalan umum. Terdapat beberapa titik untuk mengatasi kemacetan dan mengatur lalu lintas di Kota Semarang, antara lain Jalan Pandanaran, Jalan Pemuda, kawasan Simpang Lima, Jalan Imam Bonjol dan Jalan Gajah Mada. Meski Dinas Lalu Lintas Kota Semarang dan Dinas Perhubungan Kota Semarang telah memasang rambu larangan lalu lintas dan patroli keliling, namun pelanggar parkir masih terdeteksi di area parkir terbatas.

2.1 Bagan Organisasi Dishub Kota Semarang

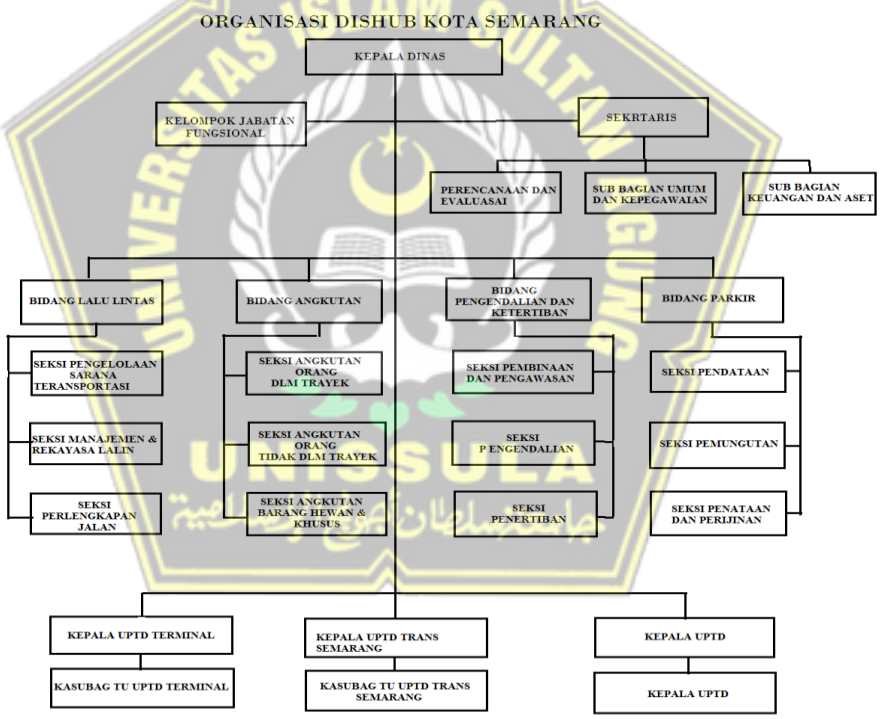

Berdasarkan bagan organisasi, struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang dipimpin kepala dinas berada di bawah organisasi fungsional dan sekretaris, sekretaris membawahi perencanaan dan evaluasi, subkomite yang merangkum dan bagian sumber daya manusia. Dinas Perhubungan Kota Semarang

meliputi beberapa sektor yaitu industri lalu lintas, industri angkutan, industri ketertiban dan pengendalian, industri parkir. Departemen Perhubungan membawahi bagian pengelolaan kendaraan, bagian pengelolaan jalan, dan bagian perlengkapan jalan.

Bidang pengangkutan membawahi bagian orang yang mengangkut orang pada jalur tersebut, bagian orang yang tidak melakukan perjalanan pada jalur tersebut, bagian yang mengangkut hewan, dan bagian angkutan khusus. Dinas Parkir membawahi Bagian Pendataan, Pendataan, Tata Letak dan Perizinan. Selama magang di bidang parkir, saya bertugas untuk mentransfer data lokasi tempat parkir ke website khusus, mentransfer bukti pembayaran atau resi parkir ke dalam spreadsheet, hingga membantu pelayanan jukir untuk memperbarui izin atau meneruskan pengaduan oleh Jukirs mengenai masalah lingkungan hidup

.

2.1.3 Tugas-Tugas Setiap Bidang Parkir

Fungsi identik dengan kata tugas yang menunjukkan sekelompok kegiatan yang sejenis berdasarkan sifat, kinerja, atau pertimbangan lainnya. Definisi ini secara kognitif mirip definisi fungsi sesuai Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008: 22), tugas yaitu rincian tugas serupa atau berkaitan erat yang dilakukan seorang karyawan tertentu, masing-masing berdasarkan pada sekelompok aktivitas serupa tergantung pada sifatnya atau cara melakukan karya seninya. Tugas masing-masing area parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Parkir

Pengelola parkir bertanggung jawab merencanakan, mengkoordinasikan, mendesak, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi bagian pendataan, pengumpulan, tata letak dan informasi perizinan.

2. Kepala Seksi Pendataan

Kepala pendataan bertugas menyusun rencana bisnis dan penganggaran kegiatan bagian pendataan, memberikan tugas kepada bawahan, dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tanggung jawabnya, memeriksa pekerjaan bawahan, menyiapkan kegiatan umum. tujuan kerja pegawai, mempersiapkan pelaksanaan koordinasi .

3. Seksi Pemungutan

Bagian Pengumpulan bertanggung jawab atas penyiapan kerja koordinasi, penyiapan kegiatan pengambilan kebijakan bagian pengumpul, penyiapan dokumen pemungutan parkir jalan dan retribusi parkir khusus, penyiapan dokumen pelaksanaan retribusi parkir umum. lokasi. jalan khusus dan biaya parkir. .

4. Kepala Seksi Penataan dan Perizinan

Kepala Bagian Perjanjian dan Perizinan bertanggung jawab menyiapkan kerja koordinasi, menyiapkan kegiatan pengembangan kebijakan Departemen Perjanjian dan Perizinan, dan menyiapkan kajian teknis perizinan pengelolaan fisik.

2.2 Aktivitas Magang

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB-KM) dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Semarang. Peluncuran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB-KM) berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 1 April sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Pendaftaran pemagangan dimulai pada bulan Februari 2021 dengan mengisi Formulir Pendaftaran pemagangan dan pengurangan SKS 6 semester, yaitu maksimal 20 SKS. Kegiatan selama magang sebagai berikut:

1. Memindahkan data titik lokasi parkir yang berada pada situs Website khusus untuk Dinas Perhubungan Kota Semarang divisi parkir ke dalam excel
2. Memindahkan kertas bukti pembayaran atau nota parkir ke dalam lembar kerja
3. Membantu dalam pengecapan karcis parkir agar lebih memudahkan dalam bertransaksi
4. Mencocokan angka pada rekon dengan rincian bukti pembayaran retribusi parkir melalui kertas kerja
5. Memasukan data titik lokasi parkir yang belum lengkap pada excel
6. Membantu melakukan pemberkasan dokumen pagawai
7. Membantu melakukan pembukuan bulan April, Mei, dan Juni yang diambil

2.3 Sistem Penerimaan Kas Dinas Perhubungan Kota Semarang

Kegiatan pengumpulan uang tunai di Dinas Perhubungan Kota Semarang dilaksanakan oleh bendahara khusus pengumpulan. Kegiatan ini khusus berkaitan dengan penerimaan dari front desk yang kemudian dicatat secara khusus oleh kasir front desk. Rincian kegiatan resepsi adalah sebagai berikut :

a. Pencatatan laporan penerimaan dari penghasilan dalam buku besar

b. Penyetoran pada kas daerah

c. Pengisian laporan harian bendahara pembantu

d. Pencatatan buku kas umum daerah

Tata cara penerimaan pembayaran dari Dinas Perhubungan untuk Dinas Perparkiran dimulai dari kewajiban membayar denda kepada bendahara pendapatan, memeriksa Surat Keputusan Sanksi Daerah (SKRD) terhadap kuota yang ditetapkan Dinas Perhubungan. . pramugari. , kemudian diserahkan kepada Bendahara Pendapatan untuk diverifikasi. mengulangi dan merekonsiliasi Surat Keputusan Remunerasi Daerah (SKRD) dengan jumlah yang diterima, bukti penerimaan (TBP) diberikan langsung pada pemungutan dan pembukuan pajak, kasir memasukkan buku kas Muka Umum dan buku tabungan koleksi dan penyetoran. Fungsi akuntansi menerima penerimaan kemudian mendebet pendapatan dan kas dari Laporan Kinerja Anggaran (LRA) ke kasir penerimaan, pencatatan ke buku besar, pencatatan ke buku besar pembantu. Berikut ini adalah diagram alir pengumpulan kas dari penerimaan pajak:

Gambar Prosedur Penerimaan Kas dari Pendapatan Retribusi Dinas Perhubungan Devisi parkir

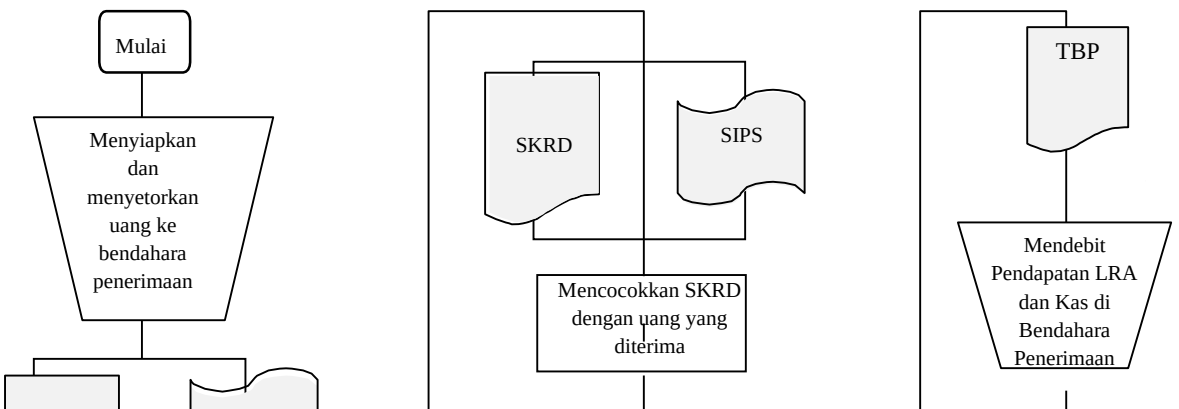

BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

3.1 Rumusan masalah

Pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah mempunyai peranan penting dalam penanganan Covid-19, termasuk penerapan kebijakan pembatasan pelaksanaan kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi aktivitas pemerintah dan mengurangi penyebaran penyakit Covid-19 yang berdampak pada penurunan mobilitas masyarakat yang begitu cepat sehingga tidak ada orang yang mau kemana-mana dan parkir di area tersebut sehingga menyulitkan masyarakat untuk beraktivitas. petugas berkurang. karena pengurangan. Akibat adanya mobilitas masyarakat, hal ini berdampak pada penerimaan pajak parkir sehingga terjadi penurunan pendapatan Dinas Perhubungan sehingga berdampak pada peningkatan anggaran pendapatan daerah (APD). Para Jukir sering mendatangi kantor Departemen Perhubungan untuk meminta pengurangan pajak parkir karena berkurangnya pendapatan dan ketidakmampuan membayar pajak yang telah ditentukan.

Pada masa pandemi Covid-19, Dinas Perhubungan Kota Semarang mengalami beberapa kali penurunan pendapatan parkir dibandingkan jumlah anggaran bulanan sebelum pandemi dan pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data laporan keuangan tahunan yang saya peroleh, terlihat penerimaan pajak parkir pada bulan Mei 2019 sebesar Rp 283.530.000, dibandingkan pada bulan Mei 2020 sebesar Rp 125.635.000. Mei 2020 menjadi awal turunnya pendapatan retribusi parkir akibat Covid-19. Hal ini terjadi karena kebijakan

pemerintah mengenai penerapan pembatasan operasional mempengaruhi penerimaan parkir.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam laporan ini adalah :

1. Bagaimana sistem pengendalian intern penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Semarang?
2. Bagaimana penerimaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Semarang sebelum dan selama pandemi?

Berdasarkan beberapa masalah di atas, maka dalam pelaporan magang ini penulis memilih topik ”Analisa Pengendalian Internal Penerimaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang Sebelum Dan Selama Pandemi Covid – 19”.

BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka adalah serangkaian definisi, konsep, dan rasio yang disusun secara hati-hati dan sistematis seputar variabel-variabel suatu penelitian yang memberikan dasar tanggapan tentatif untuk perumusan masalah dan organisasi penelitian. Latar belakang teori ini akan menjadi landasan yang kuat bagi penelitian ini. Teori yang digunakan antara lain :

4.1 Undang-Undang Tentang Parkir

UU Remunerasi Parkir dan Perhitungan Potensi Parkir dalam UU No. Pada tanggal 28 tahun 2009 (di Masdar, 2009:60) berkenaan dengan pajak daerah dan daerah menyatakan: "Pemungutan adalah serangkaian kegiatan yang diawali dengan pendataan subjek dan subjek pajak atau retribusi, menentukan besarnya pajak atau retribusi yang akan diperoleh dari pemungutan pajak atau retribusi dari wajib pajak, atau secara langsung. mendebet pajak atau biayanya." serta kegiatan-kegiatan sebagai berikut: -menambah simpanannya". Dalam penelitian ini konsep pemungutan pajak hanya dibatasi pada serangkaian kegiatan yang bertujuan mengumpulkan hasil bagi subjek dan pemungut pajak.

Retribusi parkir badan jalan sebenarnya dipungut di lokasi oleh agen parkir resmi. Valet resmi yang dimaksud di sini adalah valet yang ditunjuk secara sah oleh Departemen Perhubungan untuk memungut retribusi parkir di daerahnya dan menerima tugasnya serta memungut retribusi parkir di jalan umum yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan. dari sebuah tiket. Pemungutan retribusi parkir pinggir jalan ditujukan kepada pemungut tol atau wajib retribusi parkir pinggir jalan

yang telah menggunakan pemungut tol sesuai dengan tingkat pemanfaatan jasa parkir pinggir jalan umum. dari jalan umum. Peraturan Lalu Lintas pada Peraturan Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Jalan Umum, maka Dinas Perhubungan Kota Semarang memberlakukan sejumlah peraturan, termasuk izin parkir. Bermanfaat menghindari parkir liar. di pinggir jalan, sehingga dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Menghitung potensi biaya parkir bisa mengikuti langkah-langkah:

1. Mengumpulkan data tempat parkir kemudian mengelompokkan tempat parkir berdasarkan tingkat partisipasi, kemungkinan berdasarkan tempat parkir yang ramai, sedang, dan sepi.

2. Mendata tempat parkir berbayar, meliputi:luas parkir, ground transient untuk menghitung jumlah mobil yang parkir, observasi satu jam untuk mengetahui tingkat okupansi tempat parkir dan menghitung luas terbuka tempat parkir:

   a. Melakukan perhitungan terhadap kapasitas maksimal

   b. Melakukan perhitungan terhadap tingkat hunian

   c. Melakukan perhitungan terhadap frekuensi hunian

   d. Menghitung jumlah kendaraan parkir

   e. Melakukan perhitungan potensi retribusi parkir

3. Melakukan penjumlahan di setiap pengklasifikasian titik parkir kemudian mencari selisih diantara potensi retribusi parkir dan realisasi penerimaan setiap tahun berlangsung, maka nanti akan didapat retribusi terpendamnya.

4.2 Retribusi Parkir

Biaya parkir yang berkaitan dengan pengelolaan parkir luar badan jalan, disediakan sebagai bagian dari operasional utama maupun yang disediakan secara profesional, termasuk penyediaan parkir bermotor. Pajak khusus untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pajak didedikasikan guna meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus sekaligus menciptakan tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Sebagian penerimaan pajak daerah hendaknya didedikasikan guna mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang dapat memberikan manfaat langsung bagi wajib pajak dan masyarakat secara keseluruhan..

4.2.1 Objek, Subjek dan Retribusi Parkir

Setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar jaringan jalan, baik yang dikembangkan sebagai bagian dari kegiatan utama maupun yang dikembangkan secara profesional, termasuk penyediaan tempat parkir bagi kendaraan bermotor, dikenakan biaya atas nama retribusi parkir. . Tujuan retribusi parkir ialah penyelenggaraan tempat parkir off-road, baik yang disediakan sebagai bagian dari kegiatan utama maupun disediakan secara profesional, termasuk penyediaan tempat parkir, penyimpanan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam pajak parkir:

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri
3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik

Pemungut retribusi parkir kendaraan adalah perseorangan dan organisasi yang memarkir kendaraan bermotor. Sedangkan wajib retribusi parkir adalah perseorangan atau organisasi yang menyelenggarakan parkir.

4.3 Sistem Pengendalian Internal

4.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Secara umum pengendalian internal adalah bagian dari sistem yang digunakan sebagai prosedur dan pedoman dalam pengelolaan suatu bisnis atau organisasi tertentu. Dalam lingkungan perusahaan, pengendalian internal diartikan sebagai suatu proses yang diatur oleh manajemen (dewan direksi) dan manajemen secara keseluruhan. Pengendalian internal dirancang untuk memastikan keyakinan dalam pencapaian tujuan bisnis secara keseluruhan. Menurut Alvin, Andal dan Mark (2015:370), semakin efektif pengendalian internal maka semakin rendah koefisien risiko akibat pengendalian risiko.

.

Sistem pengendalian internal adalah sekumpulan sistem pengendalian internal terintegrasi, saling bergantung dan saling melengkapi. Penting dipahami jika sistem pengendalian internal yang efektif bukanlah jaminan mutlak bahwa tujuan bisnis akan tercapai. Sederhananya, bisa dikatakan jika sistem pengendalian yang andal tidak dapat merubah manajer yang buruk menjadi manajer yang baik, namun sistem pengendalian internal yang andal dan efektif bisa memberikan informasi yang tepat kepada manajer dan dewan direksi yang baik untuk mengambil keputusan yang tepat keputusan atau kebijakan, pencapaian dan tujuan perusahaan.

Mulyadi (2016:163), suatu sistem pengendalian internal yang mencakup struktur organisasi, metode dan tindakan terkoordinasi guna melindungi aset organisasi, memverifikasi keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan Manajemen. Secara umum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 mengatur mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Menurut PP No 60 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 1, sistem pengendalian internal yaitu:

"Suatu proses sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi secara obyektif bukti-bukti mengenai klaim mengenai aktivitas dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan khusus untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tentang aktivitas dan peristiwa ekonomi.

Pernyataan dan kriteria ini telah ditentukan sebelumnya dan dikomunikasikan hasil bagi mereka yang tertarik.

" pengguna.

" (Decy, Ni, & Rusli, 2017).

Sistem pengendalian internal berperan sebagai pengatur sumber daya yang ada agar berfungsi dengan optimal untuk mencapai efisiensi (manfaat) yang maksimal dengan pendekatan desain menggunakan prinsip biaya-manfaat.

Mengenai pengendalian internal, manajemen bertanggung jawab guna menetapkan dan memelihara sistem pengendalian internal entitas. Pengendalian internal merupakan penggunaan seluruh sumber daya perusahaan yang meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan dan memantau macam-macam kegiatan guna menjamin tercapainya tujuan perusahaan (Mayangsari, 2015). Terdapat dua konsep utama yang mendasari perancangan dan penerapan pengendalian internal,:

1. Kepastian yang yang layak

   Perusahaan mengembangkan sistem pengendalian internal untuk memberikan keyakinan yang masuk akal namun tidak mutlak jika laporan keuangan disajikan secara wajar.

2. Keterbatasan inheren

   Pengendalian internal tidak pernah 100% efektif, tidak peduli seberapa hati-hati pengendalian tersebut dirancang dan diterapkan.

4.3.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Alvin, Andal dan Mark (2015:370), manajemen mengejar tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif, adalah keandalan informasi keuangan, kinerja operasi, efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan. Mulyadi (2016:130), tujuan sistem pengendalian intern diperjelas dengan pengertian sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Kekayaan organisasi selalu dijaga.
2. Periksa keakuratan dan keandalannya.
3. Mengemudi yang efisien.
4. Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.

Dilihat dari tujuan sistem pengendalian internal, sistem pengendalian internal bisa digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pengendalian Internal Akuntansi

   Pengendalian akuntansi internal mencakup struktur organisasi utama, metode dan pengaturan untuk memelihara aset organisasi dan memverifikasi keakuratan dan keandalan data akuntansi. Pengendalian akuntansi internal yang baik akan menjamin kekayaan investor dan kreditor yang berinvestasi pada perusahaan, yang pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.

2. Pengendalian Internal Administartif

   Pengendalian administratif internal mencakup struktur organisasi, metode dan langkah-langkah koordinasi, terutama untuk mendorong efektivitas dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016:164). Menurut Cendik dan Hendro (2015: 216), dua metode penting untuk mencapai tujuan pengendalian internal adalah :

1. Dokumentasi yang memadai

Dokumentasi yang tepat atas semua transaksi bisnis adalah kunci akuntabilitas. Dokumen dan catatan yang ditulis dengan baik dapat membantu organisasi dengan cepat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul.Dokumen merupakan media yang digunakan untuk mencatat data transaksional dan peristiwa. Dokumen yang sudah lengkap disebut catatan (report). Voucher akuntansi adalah sarana pembuktian akuntansi yang sangat penting. Semua voucher akuntansi harus didasarkan pada pembukuan yang valid, akurat dan lengkap. Dokumen dan catatan yang sesuai juga dapat memastikan bahwa organisasi dapat memenuhi komitmennya.

2. Pemisahan Tugas

Pemisahan tugas melibatkan pengalokasian tanggung jawab di antara banyak karyawan untuk bagian-bagian tertentu dari suatu transaksi. Tujuannya untuk mencegah karyawan mempunyai kendali penuh atas seluruh aspek transaksi bisnis. Pemisahan tugas sangat penting dalam operasi bisnis melibatkan penerimaan atau pengeluaran uang tunai karena uang tunai dengan mudah dicuri. Pemisahan tugas adalah salah satu prinsip penting proses pengendalian internal. Prinsip ini berlaku setidaknya pada dua hal :

a. Beberapa orang ditugaskan secara terpisah guna mengerjakan satu rangkaian kegiatan.
b. Pemisahan fungsi pencatatan (akuntansi) dengan fungsi penyimpanan aset (kasir, petugas gudang), dan fungsi otorisasi transaksi.

4.3.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal

Mulyadi (2016:221), unsur pokok sistem pengendalian internal sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, piutang, pendapatan dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
4. Karyawan bermutu sesuai dengan tanggung jawabnya.

4.4 Sistem Akuntansi Penerimaan Kas

4.4.1 Pengertian Sistem Akuntansi Penerimaan Kas

Sistem akuntansi kas adalah daftar yang disimpan terlibat dalam bisnis yang menerima uang tunai dari penjualan atau piutang tersedia dan bebas guna kegiatan usaha umum (Mulyadi, 2001:500). Koleksi adalah fungsi yang paling penting pemasaran, karena menjadi tulang punggung aktivitas Anda mencapai tujuan yang dimaksudkan.

Sistem pengumpulan perusahaan saat ini dirancang untuk mengelola operasi sehari-hari, adalah transaksi berhubungan dengan mengumpulkan penjualan, menangani piutangserta transaksi lainnya. Kita bisa menyimpulkan jika sistem penerimaan Kas yaitu jaringan prosedur yang dibuat guna melakukankegiatan utama perusahaan, khususnya penagihan utang .

4.4.2 Sumber Penerimaan Kas

Pendapatan tunai perusahaan menurut Mulyadi (2001:455) berasal dari dua sumber yaitu arus kas masuk dari penjualan tunai dan menerima uang tunai dari piutang. Sistem penagihan piutang memastikan perusahaan akan menerima uang tunai dari debitur dan bukan dari luar pekerja tidak mempunyai hak.

4.5 Deskripsi Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Piutang

Unsur-unsur termasuk dalam sistem akuntansi kas, pada perusahaan dengan sistem akuntansi kas yang berasal dari Pelunasan piutang meliputi:

4.5.1 Fungsi yang terkait

Pendapat dikemukakan Mulyadi (2001:487) terkait fungsi dalam penerimaan kas:

a. Fungsi Sekretariat

   Fungsi sekretariat bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan (*remittance ad-vice*) lewat pos dari para debitur perusahaan.

b. Fungsi Penagihan

   Fungsi penagihan ini bertanggung jawab guna menjalankan penagihan piutang langsung kepada debitur lewat penagih perusahaan, guna melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan sesuai daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi.

c. Fungsi Kas

Fungsi kas bertanggung jawab guna menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi tersebut segera ke Bank dalam jumlah penuh.

d. Fungsi Akuntansi

Fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang.

e. Fungsi Pemeriksa Intern

Fungsi pemeriksa intern bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang ada ditangan kas secara periodik.

4.5.2 Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang dipakai dalam penerimaan kas dari piutang menurut Mulyadi (2001:488):

a. Surat Pemberitahuan

Dokumen dibuat oleh debitur guna memberitahu maksut pembayaran yang dilakukan. Surat pemberitahuan biasanya berupa tembusan bukti kas keluar oleh debitur, yang disertakan dengan cek yang dikirimkan oleh debitur melalui penagih perusahaan atau pos.

b. Daftar Surat Pemberitahuan

Daftar surat pemberitahuan adalah ringkasan tanda terima dilakukan oleh fungsi kesekretariatan atau fungsi penagihan. Jika menagih piutang perusahaan melalui pos, Fungsi kesekretariatan bertugas membuka amplop surat dengan memisahkan surat-surat Pemberitahuan dengan cek dan daftar pemberitahuan diterima setiap hari.

c. Bukti Setor Bank

Dokumen ini dibuat oleh Departemen Keuangan sebagai bukti setoran tunai yang diterima dari piutang bank. Bukti setoran dibuat sebanyak 3 lembar dan diserahkan oleh bagian perbendaharaan kepada bank, beserta titipannya piutang bank.

d. Kuitansi

Dokumen ini merupakan bukti penerimaan yang dibuat oleh perusahaan bagi debitur yang telah membayar uangnya Nama belakang. Penerimaan dibuat pada sistem bank tidak mengembalikan cek yang dibatalkan untuk cek penanggung.

4.6 Catatan Akuntansi Yang Digunakan

Catatan akuntansi yang digunakam dalam sistem penerimaan kaas dari piutang:

a. Buku Besar Piutang
b. Jurnal Penerimaan Kas

4.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 4.1 Kerangka Pemikiran

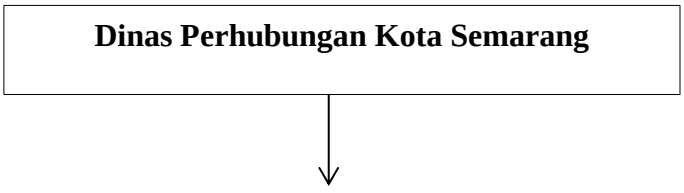

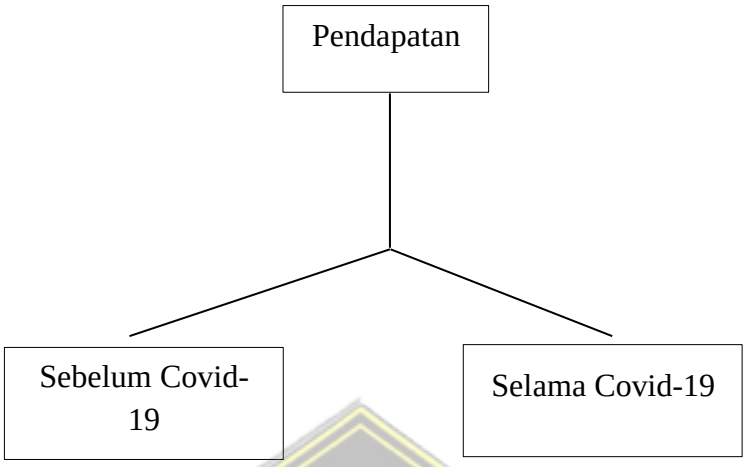

4.8 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan tanggapan sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis dianggap sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian daripada jawaban empiris (Sugiono, 2016).

1. Perbedaan pada penerimaan retribusi parkir selama dan sebelum covid-19

Pendapatan parkir merupakan total pendapatan dari operasional parkir setiap bulannya. Penerimaan parkir tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan dan pendapatan meningkat akibat dampak wabah Covid-19. Tingkat penerimaan parkir menurun akibat Covid-19, yang menyebabkan penerapan penjarakan sosial, penjarakan fisik, dan bahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pembatasan ini mulai berlaku pada Maret 2020 dan berlanjut hingga saat ini. Pembatasan ini menurunkan aktivitas perekonomian sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan para jukir.

H1 : terdapat perbedaan pada penerimaan retribusi parkir selama dan sebelum Covid-19

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis

5.1.1 Desain Penelitian

Penelitian memakai metode penilaian kuantitatif. Sugiyono (2017: 35-36), metode kuantitatif bisa dipahami sebagai metode penelitian yang sesuai filsafat positivisme, dipakai meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data memakai alat penelitian serta analisis data kuantitatif bertujuan menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. Peneliti memakai metode penilaian kuantitatif karena data yang berkaitan dengan masalah penelitian diperoleh dari data Dinas Perhubungan Kota Semarang tahun 2019-2020. Penelitian bertujuank mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, besarnya pengaruh antar variabel tersebut dan menunjukkan hubungan antar variabel.

Penelitian bertujuan memberikan informasi melalui metode deskriptif kuantitatif yang digunakan dalam penelitian dengan mengukur indeks variabel penelitian untuk lebih memahami variabel-variabel yang dianalisis pengendalian internal penerimaan parkir pada Dinas Perhubungan Kota Semarang sebelum dan selama Pandemi covid-19.

.

5.1.2 Populasi dan Sampel

Populasi yaitu wilayah yang menjadi subjek penelitian. Populasi tidak hanya manusia saja tetapi juga benda dan benda alam lainnya, sampel yaitu perwakilan dari populasi yang diteliti dan harus dapat mewakili atau mewakili suatu populasi (Sugiyono, 2018). Populasi dan sampel penelitian dari Dinas Perhubungan Kota Semarang.

5.1.3 Sumber Data

Salah satu langkah pertama yang penulis ambil untuk mengkompilasi. Salah satu melakukan penelitian adalah mengumpulkan data dari lembaga tersebut penelitian, karena data adalah salah satu masukan yang penting dalam melakukan pengelolaan data dan dibahas dalam artikel ini, di Dalam penelitian ini, penulis memerlukan data:

1. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2014: 225) menjelaskan data sekunder tersebut kemungkinan sumber data tidak langsung bagi pengumpul data. Data penelitian ini diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Semarang berupa target tahunan dan pendapatan bulanan pada Dinas Perhubungan Kota Semarang tahun 2019-2020.

5.1.4 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian yaitu langkah yang penting apakah data statistik atau non-statistik harus digunakan (Satori dan Aan Komariah, 2009, p. 11) Analisis data adalah proses pengorganisasian rangkaian data, menyusunnya menjadi model, kategori, dan unit deskriptif sedemikian rupa Topik dapat ditemukan dan hipotesis

dapat dirumuskan sesuai proposal menurut data (Moleong, 2000, hal 161). Penelitian analisis data terus menerus dari awal sampai akhir penelitian, baik di lapangan serta di luar lapangan dengan menggunakan teknik temuan oleh Miles dan Huberman (1992) :

1. Reduksi data

   Minimisasi data, melakukan rangkuman semua data yang didapat dari semua catatan lapangan setelah telaah dokumen. Minimisasi data yaitu bentuk analisis data menyaring, menunggu hal-hal penting, mengkategorikan instruksi, menghilangkan instruksi yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data agar sistematis dan memungkinkan.menarik kesimpulan yang bermakna. Dengan demikian data yang diperoleh dengan cara mengamati dan menelaah dokumen dikumpulkan, diseleksi dan dikelompokkan kemudian disimpulkan tanpa membuang nilai dari data itu sendiri..

2. Penyajian data

   Kumpulan informasi yang terorganisir menyediakan kesempatan untuk menarik kesimpulan dengan mengambil tindakan. Penyajian data ini memperlihatkan keseluruhan kelompok data yang diperoleh sehingga mudah dibaca dan dipahami. Data dapat menggambarkan terkait dampak analisa pengendalian internal penerimaan parkir pada Dinas Perhubungan Kota Semarang sebelum dan selama pandemi covid-19

3. Kesimpulan dan verifikasi Data

Kesimpulan dan Verifikasi Data yang telah disusun sedemikian rupa (terstruktur, terpusat, disusun secara sistematis) selanjutnya akan disimpulkan untuk dapat menemukan arti dari data tersebut. Namun kesimpulannya hanya sebatas itu saja sementara dan umum. Untuk sampai pada kesimpulan yang "terbukti", perlu dicari data baru lainnya untuk menguji kesimpulan tentatif mengenai analisis pengendalian internal penerimaan parkir di Dinas Perhubungan Kota Semarang sebelum dan pada masa pandemi Covid-19..

Metode analisa data yang digunakan memakai analisa perbandingan. Dengan kegiatan menyimpulkan hasil penelitian dengan memberikan kemudahan pembaca dalam memahami proses dan hasil penelitian mengenai Analisis Dampak Pandemi COVID-19 Penerimaan Parkir Dinas Perhubungan Pada Dinas Perhubungan Kota Semarang.

5.2 Metode Penelitian

Teknik analisis ini menggunakan bantuan SPSS 26 dengan metode analisis perbandingan wilcoxon. Hasil dari analisis pengujian data yaitu sebagai berikut:

5.2.1 Analisis Perbandingan

Analisis perbandingan penelitian bertujuan untuk mengetahui perubahan-perubahan baik itu penurunan maupun kenaikan yang terdapat dalam laporan keuangan.

5.2.1.1 Statistik Deskriptif

Deskripsi variabel penelitian menggambarkan masing-masing variabel penelitian disajikan dengan statistik deskriptif. Pendapatan akan dijelaskan dalam nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata. Hasil statistik deskriptif variabel ditunjukkan pada Tabel 5.2.1 di bawah ini:

Tabel 5.1

Descriptive Statistics

	N	Mean	Minimum	Maximum
sebelum pandemi (2019)	12	328.465.416	171.105.000	415.777.000
selama pandemi (2020)	12	287.376.250	125.635.000	369.990.000

5.2.1.1 Analisis Deskriptif Pendapatan Retribusi Parkir Perbulan

Jumlah data sampel yang digunakan dalam pengecekan di spss adalah sebanyak 24, 12 bulan untuk tahun 2019 dan 12 bulan untuk tahun 2020. Pendapatan retribusi perbulan Dinas Perhubungan Kota Semarang selama tahun 2019 memiliki rata-rata Rp.328.465.416,- sedangkan tahun 2020 memiliki rata-rata Rp.287.376.250,- tahun 2019 memiliki rata-rata lebih tinggi sebesar Rp.41.089.166,-

Tahun 2019 memiliki nilai pendapatan retribusi minimum sebesar Rp.171.105.000,- sedangkan tahun 2020 memiliki pendapatan minimum sebesar

Rp.125.635.000,- pendapatan minimum tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2020 dengan perbedaan sebesar Rp.45.470.000

Tahun 2019 memiliki nilai pendapatan retribusi maksimum sebesar Rp.415.777.000,- sedangkan pada tahun 2020 hanya mendapatkan Rp.369.990.000,- pendapatan maksimum pada tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2020 dengan perbedaan sebesar Rp.45.787.000,-

5.2.1.2 Analisis Deskriptif Rank Test

Sesuai metode perhitungan dari rumus Wilcoxon rank test, nilai-nilai bisa dilihat yaitu nilai mean rank, sum of ranks dari kelompok negatif ranks, postive ranks dan ties.

Tabel 5.2

Descriptive Ranks Test

Ranks				
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
selama pandemi (2020)- sebelum pandemi (2019)	Negative Ranks	8[a]	7.38	59.00
	Positive Ranks	4[b]	4.75	19.00
	Ties	0[c]		
	Total	12		
a. selama pandemi < sebelum pandemi				
b. selama pandemi > sebelum pandemi				
c. selama pandemi = sebelum pandemi				

a. Hasil Uji Negatif Ranks

N (Negatif Ranks) sebesar 8 yang artinya ada 8 bulan mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2020 dengan rata-rata pengikatan sebesar 7,38 dengan jumlah sum of ranks sebesar 59.00.

b. Hasil Uji Positif Ranks

N (Positif Ranks) sebesar 4 yang artinya ada 4 bulan mengalami kenaikan pendapatan pada tahun 2020 dengan rata-rata pengikat 4,75 dengan jumlah sum of ranks sebesar 19,00.

c. Hasil Uji Ties

Ties sama dengan 0 yang artinya pendapatan pada tahun 2019 dan 2020 nampak ada perbedaan.

5.2.1.3 Wilcoxon Signed Test

Test Statistics[a]	
	selama pandemi (2020)-sebelum pandemi (2019)
Z	-1.569[b]
Asymp. Sig. (2-tailed)	.117
a. Wilcoxon Signed Ranks Test	
b. Based on positive ranks.	

a. Hasil

Hasil output diperoleh nilai Z sebesar -1,569 dengan nilai Signifikansi. sebesar 0,117. Karena nilai Signifikansi lebih besar dari 0,05 maka cukup bukti untuk menerima H1. Oleh karena itu rata-rata pendapatan

sebelum pandemi lebih besar dari pada selama pandemi. Artinya pendapatan selama pandemi lebih kecil dari pada sebelum pandemi terjadi.

5.3 Pembahasan dan Implikasi.

5.3.1 Sistem pengendalian intern penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Semarang

Pengendalian internal ditetapkan dalam organisasi dengan tujuan melindungi aset organisasi dari segala penipuan dan kesalahpahaman yang dilakukan oleh karyawan dan manajer bisa menimbulkan kerugian bagi Negara Pengendalian internal pemungutan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Semarang juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efisiensi dan nilai keekonomian. Hal ini juga diperkuat dengan wawancara kepada sejumlah informan mengenai pengelolaan biaya parkir di Dinas Perhubungan Kota Semarang. Berikut penilaian terhadap sistem pengendalian internal yang diterapkan :

1. Lingkungan pengendalian

Sistem pengendalian intern terhadap unsur lingkungan pengendalian pada pengelolaan retribusi parkir adalah :

a. Integritas dan Etika

Untuk mendukung terciptanya Integritas dan Etika bagi pegawai dilingkup Pemerintahan Kota Semarang khususnya pada Dinas Perhubungan, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa peraturan yaitu :

1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

2) Peraturan Walikota Semarang nomor 86 tahun 2021 tentang disipin pegawai segeri sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang

Untuk penegakan kedisiplinan pagawai khususnya dibawah naungan Dinas Perhubungan Kota Semarang, maka setiap pegawai harus mengisi absensi kehadiran masig-masing setiap hari sesuai dengan waktu kehadirannya. Dari hasil wawancara dan bukti-bukti yang ditemukan dilapangan, menunjukkan bahwa pengendalian intern dalam aspek integritas dan etika telah berjalan dengan baik dan tidak adanya kecurangan karena absensi pada Dinas Perhubungan Kota Semarang telah menggunakan sidik jari yang tingkat kecurangannya sangat kecil

b. Kepemimpinan

Pengendalian internal aspek kepemimpinan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Semarang sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pihak manajemen selalu menjalin hubungan yang baik dengan bawahan dan pimpinan dalam mengambil keputusan, selalu memperhatikan setiap risiko yang akan timbul selama implementasi masa depan dan selalu berdiskusi, berkonsultasi dengan anggota lain sebelum mengambil keputusan.

Dari hasil wawancara dan bukti-bukti yang diperoleh di tempat kejadian menunjukkan bahwa pengendalian internal dalam hal lingkungan pengendalian berjalan dengan baik, dan terjalin hubungan

dengan pegawai dan manajemen Dinas Perhubungan. Angkutan kota semarang selalu membimbing pegawai dalam melaksanakan tugasnya cara yang benar dan selalu mengajarkan sopan santun.

c. Struktur Organisasi

Pengendalian internal terhadap seluruh aspek struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang khususnya bidang parkir sudah berjalan dengan baik, terlihat pada Tabel 2. 1 terlihat bahwa struktur organisasi telah ditetapkan dan struktur tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. pelayanan kota semarang. Struktur organisasi dikembangkan sejalan dengan kebutuhan Dinas Perhubungan Kota Semarang terhadap bagian parkir. Struktur organisasi telah terbagi dalam bidang kinerja dan tidak ada tugas ganda bagi pegawai sehingga terjadi check and balance.

2. Aktivitas Pengendalian

Sistem pengendalian intern terhadap unsur aktivitas pengendalian pada pengelolaan retribusi terminal adalah :

a. Pemisahan fungsi

Evaluasi efektivitas pengendalian intern ditinjau dari pemisahan fungsional dilakukan dengan memeriksa apakah terdapat pemisahan fungsional antara fungsi operasi, fungsi registrasi, dan fungsi pengendalian. Hasil penilaian menunjukkan bahwa pengendalian internal atas penetapan tugas berjalan efektif, sejalan dengan data yang ada berupa struktur organisasi dan aktualitas di lapangan. Kini terdapat pemisahan fungsi utama yaitu fungsi pendataan, pengumpulan dan pemilahan serta fungsi perizinan.

b. Dokumen

Pengendalian internal dari sisi dokumen berjalan dengan baik, berdasarkan penilaian terhadap sistem pengendalian internal yang diterapkan terhadap dokumen dan fungsional instansi. Data lapangan ditampilkan sebagai berikut:

1) Setiap juru parkir dibeikan karcis dan ada lembaran potongan sebagai bukti karcis terpakai da dasar setoran ke bendahara devisi parkir
2) Setoran retribusi ke bendahara dengan menggunakan setoran melalui bank yang akan dikirim ke rekening Dinas Perhubungan

c. Pencatatan

Evaluasi registrasi didasarkan pada registrasi transaksi yang tepat waktu dan sesuai dengan instruksi registrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern kearsipan sudah berjalan dengan baik , hal ini dapat dilihat dari setiap transaksi telah dicatat tepat waktu dan akurat, demikian halnya ada buku panduan/pedoman pencatatan yang memudahkan pegawai dalam pengimputan. Pencatatan dan pengimputan penerimaan retribusi parkir dalam sistem menggunakan buku pedoman dengan cara membuka website keuangan lalu log in.

3. Penetapan Resiko

Sistem pengenalian intern terhadap usur penetapan resiko pada pengelolaan retribusi terminal adalah :

a. Identifikasi Resiko

Pengendalian internal dalam penentuan risiko retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Semarang belum efektif karena beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pendapatan tol dan tidak tercapainya target retribusi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan bukti-bukti yang diperoleh di lapangan, tampaknya pengendalian internal pada bidang identifikasi risiko di Kementerian Perhubungan belum berjalan dengan baik karena Kementerian Perhubungan sedang bermasalah dalam pengumpulan pendapatan parkir. penyebab parkir pinggir jalan Karena beberapa faktor yang ada saat ini, pengelola departemen parkir selalu

memecahkan masalah tersebut dan mencari solusi terbaik. Pendapatan yang diperoleh tergantung pada kondisi lapangan.

b. Analisa resiko

Pengendalian intern terhadap aspek analisis resiko pada retribusi parkir di Kota Semarang sudah berjalan dengan baik dengan adanya yang ditugaskan untuk mengawasi pengendalian resiko dan Pengendalian internal aspek analisis risiko retribusi parkir di Kota Semarang sudah berjalan dengan baik, pihak yang bertanggung jawab mengawasi pengendalian risiko tersebut dan telah menggunakan teknologi tepat guna.

Dari hasil wawancara dan bukti-bukti yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa pengendalian internal di bidang pengendalian risiko berjalan dengan baik karena dilakukan oleh kepala bagian parkir dengan menyediakan kotak surat pengaduan untuk komentar terhadap kinerja pegawai Departemen Perhubungan. Hal ini sangat efektif dalam menganalisis risiko yang ada.

Dari hasil wawancara dan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pada seluruh aspek identifikasi dan analisis risiko dapat disimpulkan bahwa risiko pengendalian telah diidentifikasi, dianalisis dan dikelola.risiko pada faktor pengendalian internal di Kota Semarang Fasilitas transportasi. berjalan dengan baik karena hasil wawancara dengan beberapa informan, dimana seluruh komponen pengendalian

internal pengendalian risiko menerapkan proses pengendalian sedemikian rupa sehingga setiap kali ada masalah, masalah tersebut dilaporkan oleh masyarakat atau staf, segera dicari solusinya dicari agar masalahnya tidak bertambah parah.telah meggunakan teknologi yang memadai.

4. Informasi dan Komunikasi

Sistem pengendalian intern terhadap unsur informasi dan komunikasi pada pengelolaan retribusi parkir adalah :

a. Sarana Komunikasi

Pengendalian internal media retribusi parkir di kota semarang berjalan dengan baik, terbukti dengan transaksi retribusi parkir yang tercatat dan dilaporkan sesuai dengan keadaan perekonomian yang sebenarnya. Dari hasil wawancara dan bukti-bukti yang diperoleh di lapangan diperoleh bahwa pengendalian internal media komunikasi dengan pemberitaan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan dapat dihitung sebulan sekali, penjabaran catatan transaksi valid karena hasilnya hasil pekerjaan diperiksa dengan bendera petugas parkir valet kemudian disesuaikan dengan registrasi barang masuk dan keluar untuk memberikan informasi yang lengkap.

b. Mengelola dan mengembangkan sarana komunikasi

Pengendalian internal dalam hal pengelolaan dan pengembangan sarana komunikasi retribusi parkir di Kota Semarang sudah berjalan dengan baik, namun registrasi masih dilakukan secara manual. Berdasarkan hasil wawancara dan bukti-bukti yang diperoleh di lapangan, terlihat bahwa pengendalian internal pada bidang pengembangan dan pengelolaan media sudah berjalan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan khususnya pada bidang pengembangan media, tempat penyimpanan masih menggunakan repositori. ditingkatkan dalam bentuk digitalisasi untuk memudahkan pekerjaan karyawan.

5. Pemantauan

Sistem pengendalian intern terhadap unsur pemantauan pada pengelolaan retribusi parkir adalah :

a. Pemantauan berkelanjutan

Pengendalian intern pada aspek pengendalian retribusi parkir secara berkesinambungan di kota semarang sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari adanya pemantauan petugas terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di lapangan dan pemantauan ini dilakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu. Dari hasil wawancara dan bukti-bukti yang diperoleh di lapangan, terlihat bahwa pengendalian internal di bidang pengawasan dalam rangka pemantauan keberlanjutan dilakukan dengan mengunjungi lokasi setiap minggu dan timbul permasalahan pemantaua dan temukan solusinya.

b. Evaluasi

Pengendalian intern terhadap pada aspek evaluasi pada retribusi parkir di Kota Semarang sudah berjalan dengan baik karena evaluasi dilakukan secara sebulan sekali, tidak jarang juga melakukan evalusi secara cepat sehingga masalah dapat cepat menemukan solsinya agar bisa ditindak lanjuti dari hasil pemantauan berkelanjutan.

6. Pembahasan

flowchart

prosedur penerimaan kas dari pendapatan retribusi

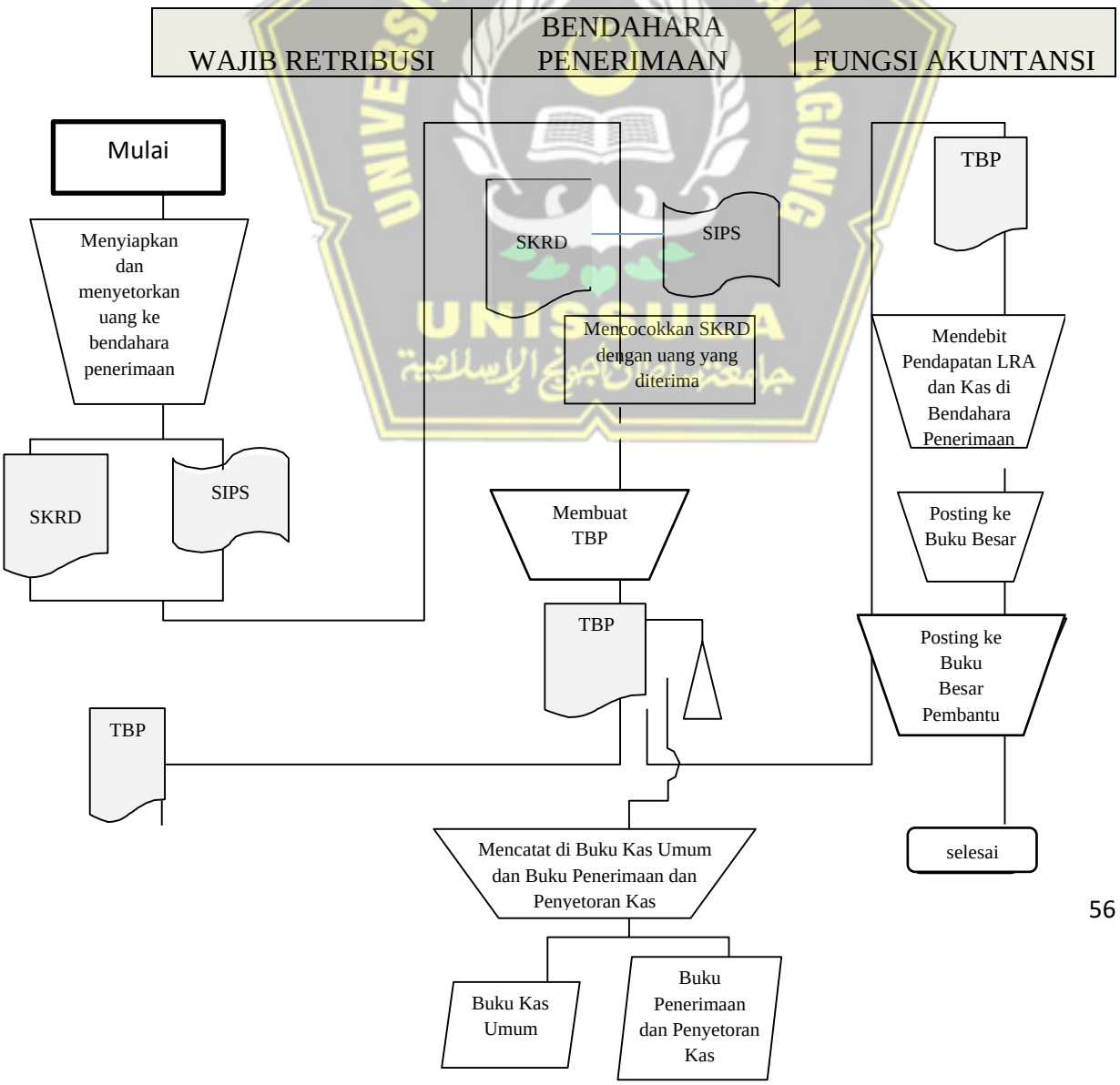

Gambar 5.3 Flowchart Prosedur Penerimaan Kas

Prosedur penerimaan kas pada dinas perhubungan devisi parkir dimulai dari bagian wajib retribusi dengan menyiapkan dan menyetorkan uang ke bendahara penerimaan, mengecek surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) dengan target pembayaran yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan kepada juru parkir, kemudian diberikan ke Bendahara Penerimaan untuk dicek ulang dan mencocokan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) dengan uang yang diterima, membuat tanda bukti penerimaan (TBP) tanda bukti tersebut langsung diberikan ke wajib retribusi dan fungsi akuntansi, Bendahara mencatat di buku kas umum dan buku penerimaan dan penyetoran kas. Fungsi Akuntansi menerima tanda bukti penerimaan lalu mendebit pendapatan laporan realisasi anggaran (LRA) dan kas di Bendahara Penerimaan, posting ke buku besar, posting ke buku besar pembantu

Dari hasil penelitian pengendalian intern yang dilakukan dikantor Dinas Perhubungan Kota Semarang didasarkan atas lima komponen sistem unsur pengendalian intern yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian

Inti dari organisasi yang dikendalikan secara efektif terletak pada sikap para pemimpinnya. Jika manajemen yakin bahwa pengendalian itu penting, pegawai lain dalam organisasi akan memahami dan menyikapinya dengan mendengarkan secara cermat kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa dari 4 pertanyaan yang masuk dalam sub indeks lingkungan pengendalian, informan kepala dinas parkir, sumber daya manusia dan sekretaris pelayanan Biro Pelayanan Transportasi Kota Semarang, berarti Dinas Perhubungan Kota Semarang mempunyai:

1) Menjadikan filosofi perusahaan sebagai pedoman kerja
2) Memiliki struktur organisasi yang telah menggambarkan kejelasan garis wewenang antar bagian organisasi
3) Menempatkan pegawai sesuai dengan latar belakang dan keahlian yang dimiliki
4) Memiliki tata tertib dan peraturan yang diterapkan didalam instansi

Pada aspek lingkungan pengendalian pada Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagian telah berjalan dengan baik hal ini dikarenakan ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir

b. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian yaitu kebijakan dan prosedur yang dirancang guna memastikan jika arah kebijakan dilaksanakan dengan baik. Aktivitas pengendalian harus dirancang sedemikian rupa sehingga aktivitas bisa mendukung aktivitas organisasi. Sesuai penelitian yang dilakukan terlihat jika diantara 3 pertanyaan yang masuk dalam sub indeks kinerja

pengendalian adalah informan, kepala parkir, pegawai dan sekretaris Dinas Perhubungan Kota Semarang, berarti Dinas Perhubungan Kota Semarang mempunyai :

1) Tercapainya pemisahan tugas dan fungsi masing-masing departemen.
2) Melakukan pemeriksaan fisik termasuk prosedur keamanan aset dan catatan instansi.
3) Melakukan pembagian tugas antara fungsi registrasi, keuangan dan operasional

Mengenai kegiatan pengendalian intern di Dinas Perhubungan Kota Semarang semuanya berjalan dengan baik baik dari unsur penugasan, dokumen, pencatatan dan sistem informasi akuntansi:

4) Telah melakukan pemisahan tugas dan fungsi masing-masing bagian.
5) Telah melakukan pengendalian fisik yang terdiri dari prosedurprosedur pengamanan atas kekayaan dan catatan instansi.
6) Menjalankan pemisahan fungsi antara fungsi pencatatan, keuangan dan operasi

Pada aspek aktivitas pengendalian pada Dinas Perhubungan Kota Semarang telah berjalan dengan baik mulai dari unsur pemisahan fungsi, dokumen, pencatatan, dan sistem informasi akuntansi.

c. Penetapan Resiko

Identifikasi risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mempengaruhi tujuan organisasi. Organisasi harus melakukan hal ini sehingga dapat memperkirakan tindakan yang harus diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Dari 2 pertanyaan yang ada pada sub indeks risiko, yaitu dari informan, kepala parkir, pegawai dan sekretaris Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu Dinas Lalu Lintas Kota, Kota Semarang Semrang mempunyai:

1) Antisipasi adanya risiko harga parkir telah diperiksa secara berkala terhadap risiko yang teridentifikasi.
2) Analisis risiko terhadap keluhan dan komentar masyarakat. Mengenai pengendalian risiko pada Dinas Perhubungan Kota Semarang, dari faktor identifikasi dan analisa risiko semuanya berjalan dengan baik karena pihak dinas telah menerapkan proses pengendalian sedemikian rupa dimana setiap permasalahan yang ada pada Dinas Perhubungan akan dilaporkan. oleh masyarakat atau staf untuk segera mencari solusi agar permasalahan tidak bertambah parah

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi mengacu pada sistem akuntansi suatu organisasi, informasi berkaitan dengan memberikan pemahaman yang jelas

tentang semua kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pengendalian dilakukan, terlihat bahwa dari dua pertanyaan pada sub indeks informasi dan komunikasi yaitu dari informan kepada kepala parkir, pegawai dan sekretaris dinas perhubungan kota semarang, hal ini berarti Dinas Perhubungan Kota Semarang Departemen mempunyai:

1) Melakukan pencatatan transaksi dengan menggunakan sistem aplikasi

2) Menyusun dan mencatat penerimaan dan penyetoran ke bank secara sah.

3) Melakukan pencatatan secara periodik sesuai tanggal penerimaan retribusi dan menyetornya ke bank.

4) Melaksanakan pertanggungjawaban baik lisan maupun tulisan.

e. Pemantauan

Pemantauan ialah proses berkelanjutan mengevaluasi kualitas pengendalian internal dari waktu ke waktu dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Pemantauan dilakukan lewat kegiatan yang berkelanjutan, penilaian terpisah, atau kombinasi keduanya yang dilakukan terlihat dari 3 pertanyaan pada subindikator monitoring, informan dari kepala tempat parkir, pegawai dan

sekretaris Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu Dinas Perhubungan Kota Semarang mempunyai:

1) Mengerjakan pemantauan yang sudah dilakukan sesuai jadwal dan sesuai ketentuan yang ditetapkan yaitu melakukan pemantauan setiap bulannya atau dua kali dalam sebulan.

2) Melakukan rapat setiap bulannya guna menindak lanjuti hasil pemantauan.

3) Melakukan perbaikan pencatatan audit apabila sudah ditemukan kesalahan.

Dalam hal pemantauan di Dinas Perhubungan Kota Semarang, dari unsur pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan terus menerus, pemantauan terus menerus dilakukan dengan mengunjungi lokasi secara bulanan.

5.3.2 Penerimaan Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kota Semarang Sebelum Dan Selama Pandemi

Tabel 5.4 Realisasi Tepi Jalan Umum di Semarang Tahun 2019-2020

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase target dan Realisasi Parkir	Selisih Target Dan Realisasi Parkir
2019	Rp30,364,428,000,-	Rp3,941,585,000,-	12,98%	Rp26,422,843,000,-
2020	Rp3,221,381,800,-	Rp3,448,515,000,-	107.05%	Rp227,133,200,-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang

Berdasarkan tabel 5.3 Target Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Semarang Tahun 2019-2020 terdapat penurunan pada nilai realisasi penerimaan parkir tepi jalan umum tahun 2020. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan parkir sebesar Rp3,941,585,000,- dan pada tahun 2020 turun menjadi Rp3,448,515,000,- Pada tahun 2019 ke tahun 2020 terdapat penurunan realisasi sebesar Rp.493.070.000,-. Tahun 2020 mengalami penurunan dan penurunan realisasi tersebut sangat berdampak pada pendapatan daerah dikarenakan pendapatan daerah paling besar merupakan pendapatan dari retribusi, Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya dampak pandemi yang terjadi pada awal tahun 2020. Dampak pandemi sangat berpengaruh terhadap retribusi parkir karena mobilitas masyarakat berkurang.

Dinas Perhubungan Kota Semarang sudah memiliki perencanaan dengan melakukan penurunan target pada tahun 2020 untuk mengatasi masalah pandemi yang akan dialamin. Walaupun adanya penurunan realisasi pada tahun 2020, tetapi target sudah melebihi yang ditetapkan sebesar 107,05% dan realisasi pada tahun 2020 tidak mengalami penurunan secara signifikan dari tahun 2019.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Hasil dan pembahasan oleh peneliti tentang Analisa Pengendalian Internal Penerimaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang Sebelum Dan Selama Pandemi Covid – 19 berdasarkan analisis perbandingan, maka diperoleh hasil :

1. Penerimaan retribusi parkir pada tabel 5.3 Pada tahun 2019 ke tahun 2020 terdapat penurunan realisasi sebesar Rp.493.070.000,-. Tahun 2020 mengalami penurunan dan penurunan realisasi tersebut sangat berdampak pada pendapatan daerah dikarenakan pendapatan daerah paling besar merupakan pendapatan dari retribusi, Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya dampak pandemi yang terjadi pada awal tahun 2020. Dampak pandemi sangat berpengaruh terhadap retribusi parkir karena mobilitas masyarakat berkurang. Dinas Perhubungan Kota Semarang sudah memiliki perencanaan dengan melakukan penurunan target pada tahun 2020 untuk mengatasi masalah pandemi yang akan dialamin. Walaupun adanya penurunan realisasi pada tahun 2020, tetapi target sudah melebihi yang ditetapkan sebesar 107,05% dan realisasi pada tahun 2020 tidak mengalami penurunan secara signifikan dari tahun 2019

2. Sistem pengendalian intern dalam pemungutan retribusi parkir pada Kantor Dinas Perhubungan dengan 5 (lima) indikator penilaian yaitu Lingkungan Pengendalian, Aktivitas Pengendalian, Penilaian Resiko, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan pada Kota Semarang pada umumya telah

berjalan dengan efektif. Penerapan pengendalian intern pada retribusi parkir yang umumnya sudah berjalan dengan baik tapi belum sejalan dengan pencapaian kinerja realisasi pendapatan retribusi parkir, dimana dari laporan 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan bahwa realisasi pendapatan retribusi terminal belum mencapai target.

6.2 Rekomendasi

6.2.1 Rekomendasi Terhadap Hasil Penelitian

1. Perlunya ada ketentuan untuk memberikan kelonggaran kepada juru parkir agar para juru parkir tidak tertekan atau kesusahan ketika membayar retribusi.
2. Harus adanya komunikasi yang baik antara juru parkir dan petugas Dinas Perhubungan agar tidak terjadi miss komunikasi.
3. Dinas Perhubungan harus memfokuskan mengeluarkan strategi baru seperti E-parkir agar mencapai realisasi

6.2.2 Rekomendasi Yang Perlu Diperbaiki Organisasi Tempat Magang Terhadap Peserta Magang

1. Lebih banyak memberikan tugas kepada peserta magang agar peserta magang tidak teralu banyak jam kosong
2. Memberikan ilmu atau pandangan tentang kegiatan yang dilakukan para petugas di DISHUB devisi parkir

6.2.3 Rekomendasi Yang Perlu Diperbaiki Program Studi

1. Pemantauan terhadap peserta magang lebih ditingkatkan untuk meyakinkan pihak perusahaan terhadap program magang
2. Sebaiknya mahasiswa magang MBKM sebelum terjun ke sebuah perusahaan diberikan pengenalan terlebih dahulu tentang pekerjaan yang akan dilakukan. Dengan begitu, peserta magang akan lebih siap secara fisik dan mental.

BAB VII

REFLEKSI DIRI

Dengan adanya program magang yang bertepat di Dinas Perhubungan Kota Semarang. Penulis mendapatkan banyak pengalaman, pengetahuan dan sarana pembelajaran yang sangat berguna kelak di masa mendatang baik itu berupa softskill ataupun hardskill, salah satu pengembangan diri yang dirasakan oleh penulis seperti disiplin, tanggung jawab, meghargai waktu, publick speaking.

7.1 Hal Positif Yang Diterima Selama Perkuliaham Dan Relevan Ditempat Magang

Masa perkuliahan yang dialami penulis banyak mendapatkan hal positif saat kuliah yang bermanfaat serta relevan saat melakukan kegiatan magang. Diantaranya adalah pemberian tugas dalam kuliah yang memiliki manfaat menjadikan penulis sebagai orang yang disiplin yang sangat berguna saat magang sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Serta dalam pemberian tugas kelompok memiliki manfaat bagi penulis ketika melakukan kerjasama dengan tim saat magang, presentasi yang dilakukan penulis dalam masa perkuliahan memiliki manfaat yang cukup besar dikarenakan dapat membuat penulis berani berbicara didepan umum serta meningkatkan skill public speaking yang dimiliki penulis.

7.2 Manfaat Magang Terhadap Pengembangan Softskill Dan Kekurangan Softskill

1. Manfaat yang dirasakan penulis terhadap pengembangan skill yang dimiliki oleh penulisan adalah sebagai berikut:
    a. Public speaking ketika menjelaskan hasil pekerjaan kepada petugas yang memberikan tugas
    b. Menyelesaikan tugas tepat waktu yang telah ditentukan
    c. Tanggung jawab atas tugas yang telah diberikan
    d. Disiplin untuk selalu tepat waktu
2. Keukurangan Soft skill yang dimiliki penulis
    a. Kurang mampu mengontrol rasa panik ketika terjadi masalah yang belum pernah dilalui penulus
    b. Kurang berani meng-explore ide-ide baru untuk memecahkan suatu permasalahan
    c. Keras kepala

7.3 Manfaat Magang Terhadap Pengembangan Kemampuan Kognitif dan Kekurangan Kognitif

1. Manfaat dalam pengembangan kognitif :
    a. Pengembangan kognitif secara kinestik dikarenakan saat masa magang penulis lebih banyak mendapatkan pekerjaan secara praktek
    b. Pengembangan kognitif secara visual yaitu kemampuan dalam membaca
2. Kekurangan kemampuan kognitif yang dimiliki penulis

a. Kemampuan kognitif secara arithmetic yaitu kemampuan dalam melakukan penghitungan

7.4 Kunci Sukses Bekerja

Berdasarkan pengalaman magang yang telah dialami penulis, maka penulis menyimpulkan beberapa kunci sukses dalam bekerja, diantaranya adalah:

a. Attitude

   Dalam dunia pekerjaan attitude merupakan suatu hal yang harus dimiliki jika ingin sukses dalam bekerja, karena attitude sangat penting untuk membangun karakter kita

b. Tanggung jawab

   Dalam menjalankan sesuatu kita harus bertanggung jawab atas apa yang sedang dilakukan atau pekerjaan yang sudah diberi

c. Menerima saran dan kritik

   Harus mendengarkan semua kritik membangun yang telah orang lain beri, karena mendengarkan masukan dari orang lain sangat bagus untuk mengembangkan diri dari kekurangan yang ada untuk menjadi lebih baik

d. Disiplin

   Setiap orang yang ingin sukses harus memiliki disiplin karna disiplin merupakan salah satu kunci yang sangat penting, ketika sedang melukan sesuatu orang yang disiplin tidak akan mudah untuk menyerah dan terus maju

7.5 Rencana Pengembangan Diri

Dalam mengatasi masalah yang ada pada saat magang maka penulis ingin melakukan pengembangan diri dimasa yang mendatang. Salah satu pengembangan diri tersebut yaitu kemampuang public speaking karena public speaking merupakan komponen penting yang harus dimiliki semua orang karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial jadi kita akan lebih sering berinteraksi dengan banyak orang, kemudian kemampuan untuk berpikir secara jernih, rasional dan cepat ketika terjadi masalah yang sedang dihadapi. Hal tersebut merupakan kekurangan yang sekarang dimiliki oleh penulis

Daftar Pustaka

Marihot Pahala Siahaan, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Penerbit Rajawali Pers.

Marihot Pahala Siahaan, 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerbit Rajawali Pers.

Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

NIM, E. P. (2013). *Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dari Piutang Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Makmur Abadi Kecamatan Kayen Kabupaten Pati* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).

Nuh Cahya Utama, (2016). *Fungsi pengawasan Dinas Perhubungan UPTD Parkir Sub Unit Tepi Jalan Dalam Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya.* Volume 4 Nomor 1. ISSN: 2303-341X.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 *tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum*.

Undang Undang Lalu Lintas Aturan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

UTAMA, NUH CAHYA. *"FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN UPTD PARKIR SUB UNIT TEPI JALAN DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN."*

Yogi Prasetyo. (2019). *Analisis pengelolaan retribusi parkir jalan umum pada dinas perhubungan dalam meningkatkan pendapatan retribusi daerah kota palembang.*

Gala Mariana yeni, 2018. *Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal Pada Persediaan Barang Dagang.*